

**Dampak Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Industri
Manufaktur di Indonesia Pada Tahun 2014**

***The Impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Toward
Manufacturing Industry in Indonesia in 2014***

Hesti Nauli Fitri Agasya

20120510197

2015

Globalization has provided opportunities for countries emerging power or developing countries to industrialized countries. The globalization process that is visible is a free trade agreement ACFTA. The agreement aims to eliminate trade barriers for the ASEAN-China, including Indonesia. But in fact, ACFTA that become a tool for Indonesia to penetrating global commodity, where the manufacturing sector is threatened by the presence of The agreement. Therefore, the aim of the authors of the study are as in-depth study of the impact of ACFTA China's relations with ASEAN countries, especially Indonesia in China to market hegemony manufacturing industry in Indonesia.

So in this study, the authors used Neoliberalism and imperialisme structuralis theory. The method used by writer is descriptive qualitative methods that will address the impact of ACFTA agreement for Indonesia's manufacturing industry descriptively.

The results of the study found that: First, the Chinese domination through ACFTA make the manufacturing industry are in a situation and conditions of competition in a free market ACFTA. Second, the role of the manufacturing industry in Indonesia is getting weaker as the impact of ACFTA agreement. The role of the Indonesian manufacturing industry to GDP after the agreement ratified is decrease continuously. decrease in the number of industrial enterprises manufactur. In general, the whole industry and enterprise groups Indonesia decreased number of companies.

Key Word: ACFTA Agreement, Manufacturing Industri, Indonesia and China

Globalisasi telah menjadi kenyataan sehari-hari yang tidak dapat dihindari. Globalisasi telah banyak memberikan peluang bagi negara-negara *emerging power* atau negara-negara berkembang menuju negara-negara industri maju.

Dengan adanya fenomena ini telah memberikan wadah kerjasama baru dalam berbagai macam bidang ekonomi, politik, teknologi dan lainnya.

Cina menjadi salah satu negara *new emerging power* bersamaan dengan munculnya fenomena globalisasi. Sejak diperkenalkannya reformasi Cina tahun 1978 Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selain itu Cina merupakan negara eksportir dan importir terbesar di dunia, Cina merupakan negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar di dunia sehingga sejumlah kalangan menilai bahwa Cina diprediksikan sebagai negara *superpower* di masa depan. Cina mampu berkembang dan tampil sebagai the new miracle of Asia, yang sejajar dengan Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang menjadi pusat keajaiban ekonomi Asia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong Cina melakukan ekspansi pasar secara besar-besaran. Bahkan penetrasi ekonominya ke global meresahkan sejumlah negara-negara tetangga seperti, Jepang, dan Korea Selatan yang juga menjadi negara ekonomi maju. Salah satu momen penting yang dimanfaatkan oleh Cina dalam ekspansinya pasar global adalah terbukanya keran perdagangan bebas ACFTA.

Dalam pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja 2 September 2003, politisi Cina mendekati negara-negara ASEAN dan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan AFTA sehingga menjadi ASEAN Plus Three. Tiongkok menilai potensi pasar ASEAN termasuk besar karena didukung oleh 530 juta penduduk yang memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi (www.unisosdem.org). ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) adalah sebuah persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara ASEAN (Association of South East Asian Nation) dengan Cina. Persetujuan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara ASEAN dan Cina pada tanggal 29 November 2004. Dalam kerjasama ini, hambatan-hambatan tarif dan non-tarif dihilangkan atau dikurangi dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas dalam kawasan regional ASEAN dan Cina Seluruh pihak kini telah memalingkan muka dari barat ketimur, berharap pertumbuhan global akan di topang negara-negara berkembang dan negara industri baru. Kebangkitan Cina serta intensitasnya yang tinggi dalam interaksinya dengan negara-negara di Asia

tenggara dengan Asia timur lainnya menjadi suatu alternatif penopang pertumbuhan internasional yang belakangan meradang.

Perdagangan bebas ASEAN-Cina dimulai pada awal tahun 2010, inberarti perdagangan di Asia Tenggara dan Cina mengadopsi sistem baru, yaitu sistem yang bebas hambatan. ACFTA sebagai wadah untuk berinteraksi dan menjalin kerjasama antar negara yaitu Cina dengan negara-negara di asia tenggara, Cina sangat banyak memberikan bantuan kepada negara di asia tenggara setelah adanya ACFTA yang pada umumnya merupakan negara berkembang dan membutuhkan bantuan untuk membangun perekonomiannya. Salah satu bantuannya adalah Cina menawarkan program bantuan pengembangan UKM Asean kedua Cina menyatakan komitmennya untuk menyediakan bantuan teknis kepada sekretariat Asean untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan butir-butir rencana yang telah disepakati yang ketiga Cina memfasilitasi perdagangan ASEAN dengan mendirikan kelompok kerja resolusi perdagangan dan bantuan langsung.

Tetapi dengan adanya ACFTA mendukung Cina menjadi negara *Super Power* di Asia yang dapat menghegemoni negara-negara di Asia Tenggara. Cina merupakan negara eksportir barang terbanyak di asia tenggara¹. Hal ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara anggota ASEAN dimana penetrasi dan tekanan pasar Cina akan semakin besar. Cina tumbuh sebagai raksasa ekonomi dunia selama dua dekade terakhir juga tidak dapat dilepaskan dari peranan pembangunan industri manufaktur. Selama tahun 1990-2005, ekspor Cina mengalami peningkatan sebesar dua puluh lima kali lipat, dibandingkan dengan peningkatan sebesar empat kali lipat yang dialami dua belas negara eksportir terbesar di dunia pada periode yang sama (Mantra, 2011). Pada tahun 2005, ekspor Cina mencapai sebesar 25 persen dari total ekspor seluruh negara selain dua belas eksportir teratas (Mantra, 2011).

Walaupun pada awalnya ACFTA ini bertujuan untuk memberikan keuntungan satu sama lain, dan menciptakan keseimbangan perdagangan (*Balance Trade*) antara negara di ASEAN, dengan bea masuk barang dari luar negeri dihilangkan (Chandra, 2011). Namun pada kenyataanya, Cina menjual barang ke negara lain dengan harga yang sangat murah dan bahkan mengalahkan

produksi dalam negeri, sehingga barang Cina membanjiri pasar di Asia Tenggara, sehingga berlakunya ACFTA diprediksi akan menyebabkan industri dalam negeri merugi terutama industri manufaktur.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang juga ikutserta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Kehadiran Cina dalam pasar manufaktur Indonesia hanya menciptakan keuntungan sepihak yaitu Cina. Terlihat bahwa pola yang tercipta adalah dominasi ekonomi Cina terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa asumsi seperti neraca perdagangan dengan Cina yang dulunya surplus pada akhirnya menunjukkan defisit.

Semenjak pasar bebas Asean Cina (ASEAN-CHINA Free Trade Area) mulai diberlakukan mulai Januari 2010, maka berbagai produk manufaktur dari Cina memasuki pasar Indonesia dengan deras. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata bahwa berbagai jenis barang elektronik yang berharga murah dari Cina mulai menggerogoti pasar elektronik lokal. Demikian juga produk lainnya seperti besi baja, tekstil, dan barang hasil industri lainnya (datacon.co.id).

Maka dari itu penulis dalam penelitian ini akan menjawab “Faktor faktor apa yang menjadikan Produk Manufaktur Cina mendominasi pasca berlakunya ACFTA?”

Gambaran permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai kajian mendalam dampak dari hubungan ACFTA Cina dengan negara-negara di ASEAN terutama Indonesia dalam hegemoni Cina terhadap pasar Industri manufaktur di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN

Neoliberalisme

Neoliberalisme sebagai varian baru dari liberalisme, dapat dilihat dari sebuah pengertian yang sangat berbeda antara pengertian yang berjalan terutama di AS dengan pengertian awalnya yang berasal dari Eropa. Liberal dalam pemaknaan awalnya adalah sebuah mekanisme pasar yang bebas dari intervensi negara. Pemaknaan ini berubah ketika ekonomi Keynesian menjadi paradigma mainstream. Keynes merupakan pemikir liberalisme yang sangat menaggungkan konsep negara dalam pasar. Keynes beranggapan bahwa penguatan pada peran

negara dalam pengendalian dan penguatan pasar, namun tetap menolak kecenderungan pemaknaan sosialis terhadap sistem ekonomi, sebagaimana yang berlaku pada negara-negara blok Soviet. Dari sini pergeseran pemaknaan liberal dimulai. Pada bagian lain, kaum liberal klasik yang tergabung dalam partai konservatif kanan mendengungkan kembali liberalisme tersebut yang kemudian terkenal sesuai dengan aliran politiknya yakni neo konservatif atau kanan baru (new right). Para teoritis dan pengamat kemudian menyebutnya dengan neoliberal sesuai dengan aliran pemikirannya yang merupakan metamorfosis dari pemikiran liberal klasik ala Adam Smith dan David Ricardo (Mas' oed, 1997).

Kritik terhadap Keynes melahirkan prinsip dasar neoliberalisme yang menekankan kembali peran pasar dan meruntuhkan peran negara kedalam pasar. Neoliberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neoliberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar (Fakih, 2001).

Pada awalnya Neoliberalisme merupakan suatu teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia paling bisa dicapai dengan cara meliberalisasikan kebebasan-kebebasan dan keterampilan-keterampilan entrepreneurial individu dan menetapkan kebebasan dan keterampilan tersebut ke dalam satu kerangka pranata yaitu pasar bebas dan perdagangan bebas (Harvey, 2009). Berdasarkan pemikiran tersebut pola pemikiran neoliberalisme, peraturan-peraturan ekonomilah yang harus menguasai sektor-sektor yang lain, bukan sebaliknya. Apa saja yang menghalangi perkembangan sektor ekonomi harus dicabut, termasuk peraturan-peraturan dan undang-undangan pemerintah.

Negara bukan lagi suatu lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, negara hanyalah sebagai lembaga atau badan yang mengurus dan mengusahakan bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan lancar melalui regulasi sebagai penunjang. Maka, peraturan pemerintah harus memihak pada kebebasan pasar, terutama menghilangkan hambatan-hambatan pasar. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi perlu membebaskan kegiatan swasta dari peraturan dan

kebijakan menghambat mobilitas, bahkan pemerintah harus menyediakan infrastruktur untuk mendukung mobilitas pasar disuatu negara (Harvey, 2009).

Saat ini praktek neoliberalisme telah menyebar keseluruh negara, dan hampir seluruh negara mempraktekkan dan mengimplementasikan neoliberalisme tersebut. Dapat dilihat dari arah interaksi negara yang makin teregionalisasi, munculnya pasar bebas antara negara, dan praktek lainnya seperti deregulasi, privatisasi, serta pemotongan subsidi, membuat neoliberalisme merupakan ideology yang umum diterapkan oleh negara-negara.

Di tingkat internasional, paham neoliberalisme berusaha untuk memudahkan perdagangan antara negara, supaya bahan-bahan, hasil bumi, dan perusahaan bisa bergerak secara lebih bebas dalam mencari bahan-bahan dan tenaga kerja yang lebih murah. Semua itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang paling tinggi. Menurut Neo-Liberalisme, salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mencabut semua kontrol yang dianggap menghalangi pasar bebas, umpamanya tentang :

- Bea/cukai (tariffs).
- Peraturan pemerintah.
- Beberapa standar, undang-undang dll.
- Halangan investasi dan aliran lalu-lintas modal.

Walaupun beberapa kebijakan pemerintah tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan secara demokratis demi untuk memenuhi tuntutan atau keinginan rakyat, namun jika peraturan itu dianggap menghalangi pasar bebas, maka peraturan-peraturan itu tetap tidak sah dan harus dicabut kembali oleh pemerintah.

Salah satu contoh Negara yang menerapkan neoliberalisme adalah Amerika Serikat, Amerika Serikat merupakan salah satu Negara maju dan mempunyai teknologi yang bisa dibilang sangatlah canggih dan infrastruktur yang memadai. Sebagai salah satu Negara yang mempunyai kekuatan politik ataupun ekonomi tidaklah sulit untuk Amerika memangsa pasar-pasar di Negara lainnya, berbeda dengan Indonesia yang memang bisa dikatakan sebagai Negara berkembang yang belum siap untuk bersaing dalam pasar bebas dan tidak mempunyai syarat-syarat seperti Negara maju yang mempunyai teknologi yang

canggih dalam bidang perindustrian, ekonomi perdagangan bebas telah menciptakan ketimpangan dimana unit-unit usaha kecil di Negara-negara dunia ketiga kaalah bersaing. Negara-negara dunia ketiga harus bersaing dalam kondisi modal yang terbatas berhadapan dengan Negara-negara maju yang mempunyai sumber daya manusia dan mempunyai teknologi yang telah mapan.

Imperialisme Strukturalis

Teori imperialisme strukturalis adalah salah satu teori dikemukakan oleh Johan Galtung, yang berdasarkan prinsip dominasi salah satu negara dengan negara lainnya baik dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Imperialisme menurut Galtung (1971) secara sederhana, yaitu corak hubungan di mana sebuah masyarakat mendominasi masyarakat lain. Ini bisa berlangsung secara parsial atau sebagian atau struktural atau keseluruhan.

Pada dasarnya imperialisme strukturalis didasarkan pada konsepsi ketergantungan, dimana terdapat negara *center* dan *periphery*, negara *center* yang sering disebut sebagai negara maju dan *periphery* adalah negara berkembang atau negara dunia ketiga. Dalam melakukan dominasi kenegara *periphery*, terdapat beberapa actor yang memainkan perannya yaitu masyarakat di negara *center* yang memiliki strata elit yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di negara *periphery*, sehingga kondisi ini menghasilkan negara *center* memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan negara *periphery* (Galtung, 1971).

Dalam interaksi *center* dan *periphery*, Galtung (1971) menjelaskan bahwa dalam interaksinya terdapat dua model interaksi yaitu *intra actor* dan *inter actor*. Interaksi *intra actor* adalah hubungan yang tercipta antara masyarakat dalam satu negara yang mempunyai nilai yang berbeda, dan *inter actor* adalah hubungan yang terjalin antara masyarakat berbeda negara. Mekanisme imperialisme yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Mekanisme Imperialisme Struktural Bekerja Antara Center dan Periphery

	A ('developed')		B ('developing')	
	inter-actor effects	intra-actor effects	inter-actor effects	intra-actor effects
<i>positive (in)</i>	raw materials	spin-offs	manufactured goods	little or nothing
<i>negative (out)</i>	manufactured goods	pollution, exploitation	raw materials	depletion, exploitation

Sumber: A Structural Theory of Imperialism

Dalam hal ini menggambarkan struktur pemasukan dari negara center adalah dalam bentuk *raw materials* sedangkan struktur keluarannya adalah berbentuk *manufactured goods*. Dan bagi negara periphery struktur pemasukannya adalah berbentuk *manufactured goods* sedangkan struktur pengeluarannya adalah *raw material*. Berdasarkan gambar diatas terdapat perbedaan mendasar dalam efek yang termuat di interkasi. Ini terutama sekali terlihat dalam tingkat pengolahan. Dalam negara produsen, bahan mentah hampir tidak ada efek intra-aktor (dalam negeri) yang positif. Sementara dalam negara yang memproduksi *manufactured goods*, efeknya sangat luas karena kompleksitas produk dan keterkaitannya dengan masyarakat.

Menurut Galtung (1971), agar eksploitasi terselubung ini bisa langgeng, harus ada kerjasama antara elit di negara maju dengan elit di negara berkembang. Dalam hal mekanisme, penetrasi merupakan faktor yang menentukan. Gagasan dasar penetrasi adalah negara maju memenetrasi 'di bawah kulit' negara berkembang dengan membangun di sana. Yang disebut jembatan penghubung antara elit-elit negara berkembang yang akan berperan penting dalam struktur keseluruhan imperialisme. Di negara berkembang elit ini adalah kalangan berpendidikan tinggi, memiliki status sosial ekonomi tinggi, memiliki mobilitas tinggi dan menempati posisi menentukan dalam proses pengambilan kebijakan.

Hubungan diatas membuat posisi dominasi negara *center* atas *periphery* sangat mungkin terjadi. hubungan ini berlangsung sejak lama, tapi bentuknya

berbeda-beda. Semula negara Barat menjajah dan mengeksploitasi negara non-Barat dengan pemaksaan menggunakan kekuatan militer. Kini penjajahan dilakukan secara halus. Sebagai analogi, penjajahan secara halus tampak pada pola pertukaran yang didasarkan pada *Comparative Advantages*. Misalnya, negara berkembang memasok bahan mentah (seperti minyak, gas bumi, hasil pertanian), sementara negara maju memasok barang manufaktur. Dalam pola hubungan ini, seolah-olah terjadi interaksi simetris. Padahal sebuah jurang sangat mungkin terbuka dan melebar sebagai akumulasi dari yang diperoleh kedua belah pihak dari pertukaran itu.

Dalam kasus perjanjian ACFTA, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara periphery dan Cina dapat dikatakan sebagai negara center. Dimana hubungan perdagangan Indonesia-Cina, Indonesia sangat besar memasok barang dalam bentuk raw material ke Cina, sedangkan Cina melakukan penetrasi pasarnya ke Indonesia melalui produk-produk manufakturnya yang memasuki Indonesia. Faktanya produk asal Jepang ke Indonesia mulai redup dan ditinggalkan. Sementara Cina mulai agresif dan mendominasi pasar Indonesia. selain barang-barang Cina memberikan nilai murah, tapi juga mampu menggantikan harga Jepang yang terbilang mahal (<http://www.suarakarya.id/>). Dengan terbukanya pasar bebas antara Indonesia-Cina melalui ACFTA ancaman yang sangat besar adalah penguasaan pasar Indonesia oleh Cina. Sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (*Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA*) diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang Cina mulai dari peniti hingga mesin modal membanjiri pasar Indonesia. Maklum, dengan bea masuk 0%, barang-barang Cina leluasa masuk ke Indonesia. ACFTA memang membuat Cina makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. (<http://indonesianreview.com>).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali

dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang diungkap dikumpulkan dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan kerangka berpikir. Pendekatan deskriptif berarti bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur fenomena-fenomena sosial tertentu dengan cermat dan disusun dan dijelaskan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang juga memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, situs internet serta catatan atau sumber informasi valid lainnya serta melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi beberapa instansi yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah. Konsep yang ada digunakan untuk memahami masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti.

HASIL

Perjanjian ACFTA

ACFTA merupakan kesepakatan antara negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak yang terlibat ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Proses menuju kesepakatan perjanjian ACFTA diawali dengan dilakukannya pertemuan tingkat kepala negara antara negara-negara ASEAN dan Cina di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 Nopember 2001. Ide kerjasama ekonomi regional awalnya diusulkan oleh Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada tahun 2000. kemudian disahkan melalui penandatanganan “Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Cina” di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Para pemimpin ASEAN dan China akhirnya berhasil menyepakati kerangka kerja sama ekonomi komprehensif dalam 2002 dan kerangka acuan menjadi dasar bagi pembentukan ACFTA. Perjanjian di sektor barang menjadi bentuk konkrit kerjasama ekonomi pertama di pihak ASEAN dan Cina, yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

Tatangan selanjutnya adalah dengan meningkatnya hubungan dipmloatik antara negara-negara ASEAN dan Cina di bidang ekonomi, akan tetapi tidak dalam bidang pertahanan. Cina dan Negara-negara di Asia Tenggara masih dalam situasi konflik yaitu terkait masalah konflik Laut Cina Selatan (LCS). Beberapa negara di ASEAN yang masih berada dalam konflik laut Cina Selatan akan tantangan besar bagi kerjasama ASEAN-Cina dalam kerangka ACFTA. Dimana konflik tersebut melibatkan Vietnam, Filiphina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Cina, sehingga konflik menjadi batu sandungan bagi kompetisi pasar di era pasar bebas ASEAN-Cina.

Pergulatan dalam kerangka ekonomi dan pertahanan pada akhirnya menjadi arena kepentingan-kepentingan negara. Perselisihan Laut Cina Selatan yang tidak kunjung selesai dapat menjadi penghambat integrasi ekonomi, atau dapat juga integrasi ekonomi dalam kerangka ACFTA dapat menjadi alat perdamaian konflik tersebut.

Pada akhirnya, pemimpin negara-negara ASEAN semakin menyadari pentingnya membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Komitmen ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi internal menjadi strategi penting. Pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dimulai pada 1 Januari 1992 dan realisasi rencana Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 adalah strategi kolektif ASEAN dalam menghadapi tantangan dan perubahan ekonomi global.

Terdapat dua instrumen hukum penting sebagai dasar dibentuknya ACFTA. Pertama, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China (Framework Agreement)*. Kedua, *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (ATG)*. ATG ini berisi kesepakatan yang memperlakukan barang dari negara asal ASEAN atau China, sebagai barang yang diproduksi di dalam negeri (*national treatment*). ATG adalah kerangka hukum (*legal framework*) kedua bagi keberlakuan ACFTA (hukumonline.com).

Namun negara-negara yang sekiranya tidak mampu bersaing memiliki beberapa proteksi terhadap produk-produk dalam negerinya. ATG mengatur beberapa proteksi yang diperbolehkan dan diakui dalam WTO. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan *safeguard* yang diatur dalam Pasal 9 ATG (hukumonline.com). Walaupun demikian implementasi kebijakan tersebut, tidak dapat membendung arus pasar yang sangat kuat antara ASEAN-Cina. Sedangkan lingkungannya yang sangat luas telah mengadopsi model perdagangan abad 21 yang berporos pada perdagangan-investasi-jasa. Hal ini berpotensi memunculkan kompetisi antara pasar negara-negara untuk saling penetrasi ke pasar ACFTA.

Maka dari itu pemberlakuan ACFTA perlu dipertimbangkan secara baik, Indonesia harus mampu memperkuat system ekonomi terutama pasar dan Industri-industri skala kecil untuk mampu bersaing dalam penetrasi pasar Cina di Indonesia.

Dampak perjanjian ACFTA terhadap Industri manufaktur Indonesia

Dalam konteks pasar bebas ACFTA antara perdagangan Cina dengan Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia adalah merupakan salah satu implementasi dari teori neoliberalisme. Melalui ACFTA, hambatan-hambatan perdagangan antara Cina dengan negara ASEAN akan dihilangkan sepenuhnya. Pada kenyataannya, peran pemerintah Indonesia hanya sebagai pengambil kebijakan pro terhadap pasar, sehingga Indonesia pada forum ACFTA pada tahun 2004 meratifikasi perjanjian pasar bebas tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keuntungan bagi pasar untuk masuk dalam persaingan bebas di kawasan Asia Timur. Akan tetapi ACFTA menjadi ancaman besar bagi negara-negara ASEAN, dimana ekonomi Cina yang terus meningkat dapat menjadi kekuatan hegemonik di tingkat regional Asia Tenggara. Industri manufaktur Cina yang terus tumbuh dapat menjadi ancaman besar bagi negara-negara dengan industri manufaktur yang lemah di ASEAN, dimana akan terjadi dominasi perdagangan antara ASEAN dan Cina.

Berdasarkan pola hubungan kerjasama Indonesia-Cina penulis melihat hubungan kerjasama pasar bebas Indonesia-Cina adalah sebatas hubungan dagang. Maka polanya hanya berbentuk ekspor dan impor produk, sehingga akan terjadi persaingan antara produk luar dan dalam negeri. Pola tersebut menunjukkan pasar yang sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan industri antara Indonesia dengan Cina. Melalui hubungan perdagangan Cina mampu mengeksport produk manufakturnya ke Indonesia.

Pada dasarnya konsep perdagangan bebas yang ditawarkan oleh kaum neoliberalisme menciptakan keuntungan bagi pasar, akan tetapi hal ini tidak berlaku secara umum, karena faktanya masih banyak negara-negara yang menganut sistem pasar terbuka dan perdagangan bebas pada level regional akan tetapi masih tidak dapat terhindarkan oleh krisis ekonomi dan krisis politik. Walaupun Cina berhasil bangkit melalui system ekonomi terbuka akan tetapi Indonesia secara umum belum dapat dikatakan sebagai negara yang mampu

berkembang di era pasar bebas. Posisi Indonesia dalam pasar bebas justru akan menunjukkan gejala negatif yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dimana berkurangnya kedaulatan negara karena pasar bebas akan menjadi penghalang intervensi negara pada pasar, sehingga pasar yang lemah akan tidak terkendali, bahkan cenderung dikuasai oleh negara lain. Pada akhirnya neoliberalisme dapat menjadi ancaman apabila pasar Indonesia tidak memiliki peranan dan daya saing yang tinggi atas perekonomian negara lainnya.

Dampak Perjanjian Acfta Terhadap Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2015

Perdagangan bebas ASEAN-Cina dimulai pada awal tahun 2010, ini berarti perdagangan di Asia Tenggara dan Cina mengadopsi sistem baru, yaitu sistem yang bebas hambatan. Secara umum kesepakatan ACFTA karena meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia melalui perdagangan bebas antara Indonesia dengan Cina sebagai mitra dagangnya. Indonesia selaku negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Cina, terlebih setelah berlakunya kesepakatan perdagangan ACFTA. Cina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia setelah ASEAN. Meningkatnya hubungan perdagangan Indonesia-Cina dipengaruhi oleh adanya kesepakatan kerjasama ekonomi mengenai perdagangan bebas yang dibuat oleh ASEAN dengan Cina. Dibuatnya kesepakatan tersebut telah menciptakan interaksi perdagangan bebas antara Indonesia dengan Cina. Selain itu, meningkatnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina terlebih karena adanya prinsip perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA yang semakin memudahkan terjadinya kegiatan ekspor impor kedua negara.

ACFTA yang dibentuk oleh organisasi kawasan ASEAN pada tahun 2002 memang utamanya bertujuan untuk meningkatkan serta menguatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dalam mensejahterakan masyarakat ASEAN dan Cina. Akan tetapi setelah diimplementasikannya perjanjian ACFTA, perdagangan Indonesia-Cina terus mengalami defisit bagi Indonesia. Hal ini justru akan menguntungkan bagi Cina untuk terus penetrasi pasar ke Indonesia, sehingga menghasilkan efek dominasi.

Pertama, dominasi Cina melalui ACFTA membuat industri manufaktur berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, dimana persaingan mengarah pada comparative advantages industri manufaktur yang saling berkompetisi dalam pasar bebas ACFTA. Peranan industri manufaktur dalam PDB mengalami kemerostan secara terus menerus. Setelah mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2001 sebesar 29 persen, sumbangsih industri manufaktur terus merosot sampai mencapai titik terendah pada triwulan II-2015 sebesar 20,9 persen. Indonesia baru menapaki porsi manufaktur dalam PDB tertinggi sebesar 29 persen pada tahun 2001. Setelah itu selama empat tahun berturut-turut turun. Naik sedikit pada tahun 2006, tetapi setahun kemudian turun lagi. Penurunan juga terjadi pada tahun 2007 menjadi 27 persen, lalu setahun kemudian naik menjadi 27,8 persen. Setelah itu terus menerus turun hingga mencapai titik terendah sebesar 23,7 persen tahun 2013. Maka dengan penetrasi industri manufaktur Cina menyebabkan beberapa sektor dapat didominasi. Sektor-sektor yang didominasi akibat perjanjian ACFTA adalah sektor alas kaki, sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor besi dan baja. sektor furnitur, sektor elektronik, sektor permesinan, dan Industri makanan dan minuman.

Peranan industri manufaktur Indonesia terhadap PDB setelah perjanjian tersebut diratifikasi, mengalami kemerostan secara terus menerus. penurunan jumlah perusahaan industri manufkatur. Secara umum keseluruhan industri dan kelompok-kelompok perusahaan Indonesia mengalami penurunan jumlah perusahaan. Walaupun terdapat beberapa perusahaan yang terus meningkat, akan tetapi total perusahaan manufkatur Indonesia terus mengalami penurunan jumlah perusahaan. Pada tahun 2008 total perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 25694 perusahaan, dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014, jumlah perusahaan manufkatur Indonesia adalah sebanyak 23744 perusahaan. Kesimpulannya, dengan berlakukannya ACFTA produk industri manufaktur Cina telah membanjiri pasar di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh pada jumlah perusahaan Manufkatur di Indonesia, apalagi yang termasuk dalam lingkup usaha kecil menengah karena terjadi persaingan harga. Produk manufkatur Cina dijual

dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk manufaktur Indonesia walaupun dari segi kualitas produk Indonesia lebih unggul. Namun bagi konsumen dengan pendapatan yang rendah, kualitas tidak lagi menjadi acuan dalam pertimbangan pembelian suatu produk.

Kedua, peranan industri manufaktur Indonesia yang semakin melemah sebagai dampak dari perjanjian ACFTA. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada perekonomian negara. Manufaktur mempunyai posisi yang lebih dimana industri manufaktur memiliki nilai yang lebih besar dari pada, industri *raw material*. Pada umumnya industri manufaktur merupakan industri pengolahan sehingga mempunyai nilai tinggi dibandingkan dengan industri non-pengolahan.

Industri yang terus mengalami penurunan adalah Industri pakaian jadi, yang pada tahun 2008 jumlahnya adalah 2408 perusahaan dan terus menurun hingga pada tahun 2014 sebesar 2034. Kemudian Industri Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan dan lainnya yang pada tahun 2008 sebesar 1536 perusahaan, kemudian pada tahun 2014 menurun hingga 1066 perusahaan. Kemudian jumlah perusahaan yang terus menurun adalah kertas dan produk yang terbuat dari kertas yang pada tahun 2008 sebanyak 522 perusahaan, yang menurun pada tahun 2014 sebanyak 485 perusahaan.

Kemudian perusahaan produk batu bara dan pengilang minyak bumi juga terus mengalami penurunan. Produk batu bara dan pengilang minyak adalah sektor pengolahan yang memurnikan raw material menjadi batu bara dan produk minyak murni. Pada tahun 2008, industri ini memiliki perusahaan sebanyak 77 dan terus menurun hingga pada tahun 2014 sebanyak 71 perusahaan. Kelompok industri yang juga mengalami penurunan adalah Barang galian bukan logam yang pada tahun 2008 sebanyak 1778, dan setelah pengimplemetasian ACFTA menurun pada tahun 2014 sebanyak 1584. Dan sektor yang juga mengalami penurunan jumlah perusahaan adalah furniture yang pada tahun 2008 sebanyak 1701 perusahaan dan pada tahun 2014 sebanyak 1290 perusahaan.

Secara umum keseluruhan industri dan kelompok-kelompok perusahaan Indonesia mengalami penurunan jumlah perusahaan. Walaupun terdapat beberapa

perusahaan yang terus meningkat, akan tetapi total perusahaan manufaktur Indonesia terus mengalami penurunan jumlah perusahaan. Pada tahun 2008 total perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 25694 perusahaan, dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014, jumlah perusahaan manufaktur Indonesia adalah sebanyak 23744 perusahaan.

Berdasarkan fakta dilapangan menurut Menteri Perindustrian Andung A Nitimiharja Sebanyak 87 industri manufaktur bangkrut selama satu periode, sebanyak ribuan orang kehilangan pekerjaan di industri yang kebanyakan dari sektor alas kaki tekstil dan produk tekstil dan elektronik menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut tutup karena kalah bersaing dengan produk impor yang masuk secara legal ataupun ilegal Sebagian lagi karena masalah keuangan ekonomi biaya tinggi dan ketenagakerjaan (Koran.tempo.co).

Berdasarkan data diatas setelah pengimpelemntasian perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina membuat industri dalam negeri, terutama industri manufaktur terus menurun. Sehingga perjanjian ACFTA secara umum berdampak pada penurunan jumlah Industri didalam negeri. Hal ini lah yang disebut sebagai gejala deindustrialsiasi atau fenomena gulung tikar industri manufaktur Indonesia.

KESIMPULAN

Melemahnya peran industri manufaktur merupakan dampak dari penerapan perjanjian ACFTA, dimana Cina mampu mendominasi neraca perdagangan sehingga mengalami surplus, sedangkan Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami deficit. Perjanjian ACFTA juga dapat berdampak pada penurunan jumlah industri dalam negeri karena tergerus oleh produk-produk Cina yang membanjiri pasaran Indonesia.

REFERENSI

- Chandra, Alexander C dan Lucky A. Lontoh. 2011. *“Indonesia-China Trade Relations The Deeping of Economic Integrator amid uncertainty?”*. Interntional Institute for Sustainable Development.
- Burmansyah,Edy, 2014.”*Rezim Baru ASEAN; Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*” Resistance and Alternatives to Globalization (RAG), Insist, Jakarta.
- Fakih, Mansur. 2001. *“Sesat Pikir Teori Pembangunan 6 Globalisasi”*, Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Halwani, Hendera, 2002. *“Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi”*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yanuar, Ikbal, 2006. *Ekonomi Politik Internasional 1 Konsep dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2005. *“Pengantar Studi Hubungan Internasional”*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Mantra, Dodi. 2011. *“Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme”*. Mantra Press. Bekasi
- Mas’oed, Mohctar. 1997. *Ekonomi Politik Internasional*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM.

Jurnal dan Artikel

- Ardian, *“Dampak Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Perdagangan Indonesia”*, www.ardianlovenajljalita.com , diakses pada tanggal 13 november 2015
- CRS Report for Congress. *“China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues, and Implications for the United States”* Updated April 4, 2006. Diunduh pada <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32688.pdf> tanggal 13 November 2015.

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/2010-08.pdf> Jurnal: Ivan Lim dan Philipp Kauppert, FES Jakarta, Maret 2010, “Dilema Politik dalam Menghadapi ACFTA Apa Pilihan untuk Indonesia?”

Ignatius Ismanto & Indra Krishnamurti “Research Report: The Political-Economy of ASEAN-China FTA An Indonesian Perspective”. Diunduh pada http://www.wti.org/fileadmin/user_upload/wti.org/7_SECOWTI_Project/Publications/Final_Report_ACFTA_2014_.pdf, tanggal 05 November 2015.

Iswandari, 2014, “Perkembangan Produk Tekstil Cina Di Indonesia Pasca Implementasi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) 2010”. Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 yang diunduh pada [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20ISWANDARI%20\(11-20-14-04-24-59\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20ISWANDARI%20(11-20-14-04-24-59).pdf)

Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra, dan Fadjar Adriant. “ACFTA: Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam”. Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8 3 Februari - Juni 2010, *Perdagangan Bebas ASEAN-Cina: Berdagang untuk Siapa?*

Jurnal Kajian Lemhannas RI ed.14/2012. *Peningkatan daya saing Industri Indonesia guna menghadapi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional*. Diunduh: 2 Oktober 2015, pada:http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/jurnal_internasional.pdf

Kajian Penyusunan Target Ekspor Impor Indonesia.pdf, Pusat Kajian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. diakses pada tanggal 1 Desember 2015, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_217746.pdf

Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa dari Perekonomian Asia Timur, Arisyi F. Raz, Tamarind P. K. Indra, Dea K. Artikasih, and Syalinda Citra. Buletin Ekonomi Moneter dan Perdagangan 2012. Volume 15 Tahun 2012

Laporan Akhir BAPPENAS, Desember 2010 “Perubahan Produktivitas Industri Manufaktur Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Analisis Panel Data 2000-2007”. Diunduh pada: <http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2010> Tanggal 15 November 2015. Hal 1

Peni Hanggarini. “*Interaksi Cina dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional vs Identitas Bersama*” diunduh pada: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Interaksi%20Cina%20dengan%20ASEAN%20-%20Antara%20Kepentingan%20Nasional%20vs%20Identitas%20Bersama.pdf>. tanggal 13 November 2015.

Riset Lim Sanny Universitas Bina Nusantara, Jakarta: “*Peningkatan Daya Saing Industri Di Indonesia*”.

Regimun “Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia – China” diunduh pada tanggal 15 Desember 2015, yang diunduh pada: <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Perdagangan%20Produk%20Alas%20Kaki%20Indonesia-%20China.pdf>

Sigit setiawan “ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan Cina” diunduh pada: <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/06/26/-1372216618.pdf>, tanggal 05 November 2015.

Sigit Setiawan “*ASEAN-CHINA FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina*” Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI. Diakses pada: http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf. Pada tanggal 1 Desember 2015.

Website

http://kemenperin.go.id/statistik/query_negara.php?negara=Rep.rakyat+Cina&jenis=i diakses pada tanggal 27 Juni 2015.

<http://koran.tempo.co/konten/2005/07/01/44217/87-Industri-Manufaktur-Bangkrut>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

<http://www.bappenas.go.id/files/1813/5763/0712/bab-18-peningkatan-daya-saing-industri-manufaktur.pdf>

http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Perdagangan-Luar-Negeri-Indonesia-Ekspor-Menurut-Kode-SITC-2013-2014.pdf Diakses pada tanggal 1 agustus 2015

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150616112716-78-60270/menkeu-sebut-impor-anjlok-karena-industri-manufaktur-melemah/>

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Tri%20wibowo_Potret%20Industri%20Manufaktur.pdf

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b73c9f1efc40/acfta-iopportunitiyang-penuh-tantangan> diakses pada tanggal 17 November 2015.

<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/4299/Struktur-Industri-Indonesia-Masih-Lemah> diakses pada tanggal 12 agustus 2015

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3081/Industri-Baja-Kian-Terseok-seok>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/4195/Impor-Produk-Elektronika-Meningkat-Tajam>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3757/Produk-Impor-China-Merajalela-di-Tanah-Air>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3242/Kemenperin-Membuka-Peluang-Ekspor-Mamin-Ke-China>

https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=4&tab=division

<http://marketeers.com/article/investasi-tiongkok-ke-indonesia-bertambah-us-19-miliar.htm>
